

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah satu diantara dari 120 negara di dunia yang menganut sistem demokrasi, yakni sistem pemerintahan yang meletakkan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam sistem pemerintahan yang diterapkan, setiap warga negara punya hak yang setara saat pengambilan keputusan politik, termasuk dalam memilih pemimpin lewat proses pemilihan umum. Indonesia sendiri menganut sistem Demokrasi Pancasila. Sistem Demokrasi Pancasila ialah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demokrasi ini menekankan pada kekeluargaan dan gotong royong, dan bertujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Penerapan demokrasi Pancasila ditandai dengan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta mengakui dan menghargai perbedaan (Zulfa, Ananda, Agustya, Waziroh, 2006).

Demokrasi Pancasila tercermin pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan pentingnya partisipasi rakyat pada penyelenggaraan pemerintahan. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, ruang demokrasi di Indonesia mengalami perluasan yang signifikan. Pergeseran dari sistem pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik pada masa reformasi (Hanik, 2020) memberi ruang lebih terbuka bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam rangkaian politik. Pada hal ini termasuk pada pemilihan umum sebagai sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat.

Dalam mewujudkan jalannya demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia, diperlukan peran Partai Politik yang berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat, sebagai pembentuk kebijakan, pengawas pemerintah, dan sarana partisipasi politik. Sedangkan Gymnastian (2019) menambahkan bahwa partai

yang ikut pada kontestasi pemilu akan bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan (kekuasaan) dengan menggunakan berbagai strategi untuk memenangkan kontestasi.

Negara demokrasi ditandai beberapa ciri-ciri, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat artinya rakyat memilih langsung wakil-wakilnya dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden/Wakil Presiden. Kedua, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Ketiga, warga bebas mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai koridor hukum. Keempat, sistem pemerintahan presidensial artinya presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung rakyat. Kelima, supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) maksudnya ialah setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Keenam, adanya lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD) untuk menyuarakan aspirasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas, jujur, dan adil ialah salah satu pilar utama pada sistem Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Pilar bisa dimaknai menjadi prinsip-prinsip yang membentuk landasan negara demokrasi di Indonesia. Beberapa pilar lain yang ada dalam Demokrasi Pancasila. Pertama, demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya pemimpin wajib mempertanggungjawabkan semua perlakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, artinya menjalankan sasaran untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ketiga, demokrasi yang didukung kecerdasan, artinya kecerdasan dalam bidang politik ialah persyaratan dalam menciptakan demokrasi. Keempat, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan, artinya pemisahan kekuasaan sangat penting.

Kelima, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum (*rule of law*), artinya tanpa hukum akan membuat ketidaknyamanan dalam berdemokrasi. Adanya perlindungan konstitusional, badan peradilan, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan. Keenam, demokrasi yang menjamin

otonomi daerah, artinya sebagai wujud prinsip demokrasi kekuasaan negara tidak dipusatkan pada pemerintah pusat saja, melainkan diserahkan pada pemerintah daerah. Ketujuh, demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya hubungan antar warga negara untuk merasakan kemerdekaan yang sama. Kedelapan, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, artinya perekonomian ialah hal utama dalam menyejahterakan rakyat maka perekonomian wajib dijaga. Kesembilan, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, artinya tidak ada perbedaan di mata hukum dan hakim tidak boleh memihak pada golongan tertentu karena semua sama di mata hukum.

Setiap lima tahun, masyarakat diberikan kesempatan guna memilih pemimpin nasional, baik presiden dan wakil presiden, maupun wakil rakyat di berbagai tingkatan. Kemudian, mengacu pada Pattiasina (2015), pemilihan umum bisa dipahami sebagai suatu mekanisme guna memilih individu-individu yang akan menempati posisi-posisi strategis pada struktur pemerintahan. Posisi-posisi itu sangat beragam, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif di berbagai tingkatan, hingga kepala desa. Pemilu ialah wadah partisipasi masyarakat pada proses politik secara sukarela, tanpa paksaan dari pemerintah, sehingga mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi.

Sistem pemerintahan demokrasi ialah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak mayoritas yang dilaksanakan secara kolektif dan dipilih lewat proses pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 amandemen keempat yakni: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berlandaskan UU Dasar”*.

Pada sistem demokrasi, setiap calon punya kebebasan untuk bersaing mendapat dukungan suara dari masyarakat, dan hampir semua warga negara yang telah dewasa punya hak guna memilih (Huntington, 1991). Demokrasi modern umumnya mengadopsi sistem perwakilan, sehingga lembaga legislatif

ataupun parlemen menjadi pilar utama pada pelaksanaan demokrasi tersebut. Meskipun kedaulatan secara prinsip berada di tangan rakyat, namun sebab tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat langsung dalam pemerintahan, maka dibentuklah lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih lewat pemilu sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pemilu tahun 2004 menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia sebab untuk pertama kalinya rakyat secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pemilu langsung ini menandai kemajuan signifikan pada sistem demokrasi Indonesia, bahkan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Pemilu itu juga menyebabkan perubahan strategi dan pendekatan yang dilaksanakan partai politik (Budiarjo, 2019).

Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 menjadi momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia sebab untuk pertama kalinya pemilihan legislatif dan eksekutif diselenggarakan secara serentak. Di pemilu tersebut, masyarakat tidak sekadar memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga memilih para wakil rakyat di berbagai tingkatan, mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Penyatuan pemilihan ini menandai langkah besar pada upaya efisiensi dan penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

Setelah memasuki era reformasi, jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu mengalami fluktuasi. Di pemilu 2009, tercatat sebagai pemilu dengan jumlah peserta terbanyak, yakni sebanyak 38 partai politik, termasuk 18 partai baru. Namun, di pemilu 2014 terjadi penurunan drastis jumlah peserta sebesar 68%, menyisakan hanya 12 partai yang lolos sebagai peserta resmi. Lima tahun kemudian, di pemilu 2019, jumlah partai meningkat sebesar 16,67% dibanding pemilu yang lalu, dengan 14 partai dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan verifikasi dari total 27 partai yang mendaftar. Beberapa partai yang turut serta di pemilu itu antara lain Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, PKS, PKB, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura (KPU, 2019).

Satu diantara partai politik besar yang menjadi peserta pemilu ialah PDI Perjuangan. Partai ini punya latar historis yang erat kaitannya dengan peristiwa 27 Juli 1996, sebuah insiden penting pada sejarah politik Indonesia. Peristiwa itu menjadi titik awal munculnya Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh sentral pada kancah politik nasional, sekaligus menandai kebangkitan PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik yang signifikan di era reformasi. PDI Perjuangan pada dasarnya punya keterkaitan historis dengan partai-partai yang pernah eksis pada masa Orde Lama. Partai ini ialah kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang didirikan pada 10 Januari 1973. Pembentukan PDI sendiri ialah hasil dari fusi lima partai politik, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Murba (Andi, 2021).

PDI Perjuangan adalah satu di antara partai politik terbesar di Indonesia yang konsisten memperoleh dukungan signifikan pada setiap gelaran pemilu. Di pemilu 1999, partai ini mencatatkan pencapaian luar biasa dengan meraih 33,74% dari total suara nasional dan berhasil mengamankan 153 kursi di DPR (KPU, 2011). Capaian itu membuat PDI Perjuangan sebagai partai pemenang di pemilu pertama pasca-reformasi. Kemenangan ini tidak lepas dari citra PDI Perjuangan yang saat itu dipandang sebagai simbol perlawanan kepada rezim Orde Baru yang baru saja runtuh pada 1998. Pemilu 1999 menjadi titik balik pada sejarah politik Indonesia, sebab menandai pergeseran fokus politik nasional dari dominasi kekuasaan menuju kompetisi multi partai yang lebih demokratis. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah partai politik yang ikut serta dibandingkan dengan masa Orde Baru, ketika pilihan politik masyarakat sangat terbatas (Djojosoekarto et al., 2008).

Sejak era reformasi, perjalanan politik PDI Perjuangan menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif pada hal perolehan suara. Setelah meraih kemenangan besar di pemilu 1999, partai ini mengalami kemunduran di pemilu 2004. Pemilu 2004 menjadi momen penting sebab untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, menggantikan sistem

sebelumnya di mana keduanya dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). di pemilu tersebut, PDI Perjuangan tidak berhasil memenangkan calon presiden yang mereka usung, sekaligus mengalami penurunan jumlah suara secara signifikan. Berdasarkan Sitompul (2008), kemerosotan ini disebabkan ketidakmampuan PDI Perjuangan dalam mengatasi isu-isu krusial seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme selama mereka punya kekuasaan di parlemen. Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai ini turut berkontribusi pada berkurangnya dukungan pemilih.

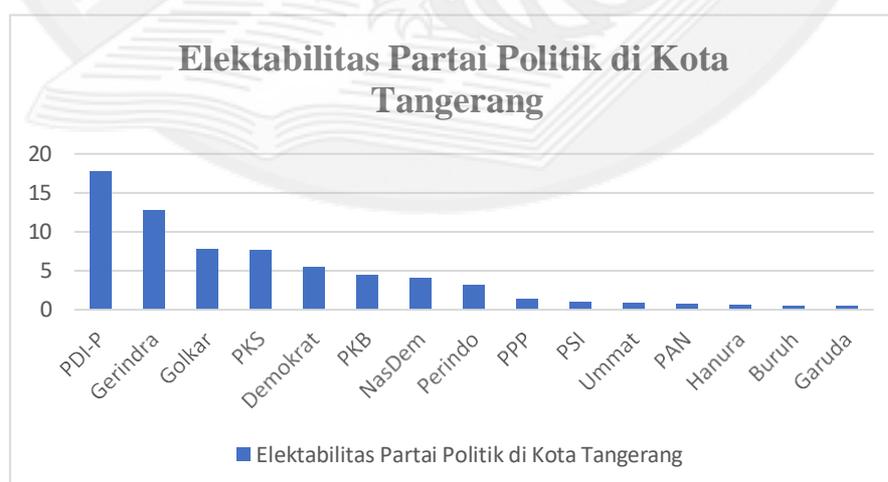
Penurunan perolehan suara PDI Perjuangan di pemilu 2009 disebabkan beberapa faktor strategis dan internal. Satu diantara penyebab utamanya ialah kegagalan partai dalam membangun citra kuat di hadapan publik, serta ketidakefektifan dalam menjalankan peran sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian, PDI Perjuangan juga melaksanakan kesalahan pada strategi komunikasinya dengan menjadikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bagian dari kampanye, meskipun sebelumnya partai ini secara terbuka menolak program tersebut. Inkonsistensi ini berdampak negatif terhadap kepercayaan publik. Di sisi lain, perpecahan internal yang terjadi pada tahun 2005, yang memunculkan faksi baru bernama Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan, turut melemahkan kekuatan politik partai. Konflik internal ini menyebabkan suara pemilih PDI Perjuangan terpecah dan tidak terkonsolidasi secara solid (Sitompul, 2008).

Pemilu 2024 di Kota Tangerang menghadirkan dinamika politik yang cukup signifikan, khususnya pada hal perubahan peta kekuatan partai politik. PDI Perjuangan mengalami penurunan elektabilitas yang cukup mencolok dibandingkan pemilu yang lalu. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Kota Tangerang, PDI Perjuangan yang sebelumnya menjadi partai peraih suara terbanyak di pemilu 2019 dan memperoleh 10 kursi di DPRD Kota Tangerang, kini hanya berhasil mengamankan 7 kursi dengan total suara sekitar 144.111 ataupun 14,15% (KPU Kota Tangerang, 2024). Sementara itu, Partai Golkar yang di pemilu yang lalu berada di posisi kedua, justru berhasil melampaui PDI Perjuangan dengan

perolehan suara sebesar 175.034 ataupun sekitar 17,18% dan mendapatkan 9 kursi di DPRD. Hal ini menandai adanya pergeseran dukungan masyarakat Kota Tangerang terhadap partai politik yang selama ini mendominasi, termasuk PDI Perjuangan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa daya tarik politik PDI Perjuangan mulai melemah di tingkat lokal, khususnya di Kota Tangerang. Meskipun secara nasional PDI Perjuangan masih menduduki posisi teratas pada berbagai survei elektabilitas dengan kisaran angka 20% hingga 24% (dalam Kompas, 2023), namun kenyataannya di tingkat kota, partai ini mulai kehilangan dominasinya. Fluktuasi elektabilitas dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya strategi komunikasi politik yang kurang efektif, kejenuhan pemilih terhadap figur ataupun program yang ditawarkan, serta keberhasilan partai pesaing seperti Golkar dalam membangun jaringan akar rumput dan meningkatkan intensitas kampanye di daerah-daerah strategis (Purwaningsih, 2019). Satu diantara contoh nyata terlihat di Dapil 5 yakni Cibodas, Periuk, Jatiuwung. Dimana Golkar unggul jauh dengan meraih 23,44% suara, sementara PDI Perjuangan hanya mendapatkan 11,43%.

Survei Litbang Kompas terkait elektabilitas partai politik jelang pemilu 2024 di Kota Tangerang pada periode 27 Juli – 7 Agustus 2023. Tren elektabilitas PDI Perjuangan masih berada di puncak, sementara Partai Gerindra berada di urutan kedua. Ini survey yang dilaksanakan Litbang Kompas dengan hasil:



*Gambar 1.1 Grafik elektabilitas partai politik di Kota Tangerang*

*Sumber: Litbang Kompas, 2023*

Sementara itu, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilaksanakan pada periode 10-11 Januari 2024, tren elektabilitas PDI Perjuangan mengalami penurunan dan disalip Gerindra dengan hasil survei 20,8%, sementara PDI Perjuangan berada di 20,4% yang kemudian disusul Golkar dengan hasil data menunjukkan di angka 11,5%.

Tren naik turunnya elektabilitas partai politik pada setiap pemilu ialah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi banyak aspek, baik internal partai ataupun dinamika eksternal di tengah masyarakat. Di Kota Tangerang, di pemilu 2024, pergeseran kekuatan politik antar partai terlihat cukup signifikan. PDI Perjuangan di pemilu 2019 berhasil mendominasi perolehan suara, justru mengalami penurunan elektabilitas yang cukup tajam pada 2024 (KPU Kota Tangerang, 2024). Sebaliknya, Partai Golkar justru mengalami peningkatan suara yang signifikan dan berhasil menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi di kota ini. Fluktuasi elektabilitas ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor utama yang saling berkaitan.

Satu diantara penyebab utama naik turunnya elektabilitas partai ialah efektivitas strategi komunikasi politik. Partai yang mampu menyampaikan pesan politik secara jelas, konsisten, dan menyentuh kepentingan langsung masyarakat cenderung mendapatkan tempat di hati pemilih (Prasetyo, 2022). Strategi komunikasi yang personal seperti kampanye *door to door* sangat potensial, tetapi wajib dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat. Jikalau pendekatan ini hanya bersifat formalitas ataupun sekadar menyampaikan pesan tanpa ruang dialog, maka dampaknya menjadi minim. PDI Perjuangan, misalnya, pada banyak kasus mengandalkan kader guna menyampaikan pesan partai secara langsung, tetapi jikalau kader kurang terlatih, tidak memahami isu lokal, ataupun tidak mampu membangun kedekatan emosional dengan warga, efektivitas strategi ini akan menurun drastis (Hidayat & Yulianto, 2021). Di sisi lain, partai seperti Golkar dan

PKS dinilai berhasil menjalankan komunikasi politik yang adaptif dengan karakter masyarakat Tangerang.

Figur calon legislatif juga memegang peran besar dalam mempengaruhi elektabilitas partai. pada konteks pemilu legislatif, banyak pemilih yang lebih memilih berlandaskan figur daripada partai (Kompas, 2022). Jika partai tidak mengusung calon yang dikenal, punya rekam jejak baik, dan dekat dengan konstituen, maka suara partai secara otomatis akan terdampak. Golkar, pada hal ini, mengusung beberapa tokoh lokal yang sudah punya basis kuat di masyarakat. Hal itu membuat partai ini lebih unggul di beberapa daerah pemilihan dibanding PDI Perjuangan yang sebagian calegnya dianggap kurang dikenal luas. Popularitas calon, kedekatan sosial, dan keterlibatan langsung pada kehidupan warga menjadi nilai tambah yang secara langsung meningkatkan suara partai.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, faktor isu lokal dan kebijakan pemerintah daerah juga turut memengaruhi persepsi pemilih terhadap partai politik. Masyarakat Kota Tangerang semakin kritis dan sensitif terhadap kebijakan-kebijakan publik yang menyentuh kehidupan sehari-hari, seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengelolaan sampah. Partai politik yang dianggap tidak mampu menyuarakan ataupun memperjuangkan aspirasi masyarakat secara nyata akan kehilangan kepercayaan publik. pada beberapa kasus, partai-partai yang terlalu elitis ataupun hanya hadir menjelang pemilu tidak lagi dianggap relevan. Sebaliknya, partai yang rajin turun ke lapangan, mendengarkan keluhan warga, dan hadir pada kegiatan sosial masyarakat cenderung mengalami peningkatan suara.

Kemudian, dinamika internal partai seperti konflik kepengurusan, lemahnya koordinasi, dan kurangnya konsolidasi kader turut menjadi faktor penurunan elektabilitas. PDI Perjuangan, misalnya, sempat menghadapi tantangan koordinasi di internal strukturalnya di Kota Tangerang, termasuk pada pendistribusian alat peraga kampanye dan pembagian wilayah kerja kader. Ketika mesin partai tidak bergerak secara solid, maka upaya mobilisasi suara pun menjadi tidak maksimal. Di sisi lain, partai-partai seperti PKS dikenal dengan kekuatan kaderisasi dan

soliditas internal yang tinggi, sehingga bisa bergerak lebih terorganisir dan efisien dalam mendekati pemilih (Nuraeni & Djuhana, 2019).

Faktor eksternal lainnya ialah pengaruh media sosial dan kampanye digital. Di era digital, banyak pemilih muda yang cenderung lebih terpengaruh narasi dan konten yang disebar di media sosial. Partai yang mampu mengelola media sosial secara kreatif dan konsisten akan punya peluang besar dalam membangun citra positif dan menarik pemilih milenial dan Gen Z (Saputra & Erowati, 2021). Sebaliknya, partai yang kurang aktif ataupun tidak responsif pada kanal digital akan kehilangan pangsa pasar pemilih muda yang jumlahnya semakin dominan.

Terakhir, periode politik lima tahunan juga berpengaruh. Pemilih cenderung punya harapan baru di setiap pemilu, dan hal ini sering dimanfaatkan partai-partai guna menawarkan alternatif ataupun perubahan. Pada konteks ini, partai-partai besar yang terlalu lama berkuasa bisa mengalami kejenuhan dari pemilih. Ini bisa menjelaskan mengapa PDI Perjuangan, meskipun masih kuat secara nasional, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan di beberapa daerah seperti Kota Tangerang. Sementara partai seperti Golkar memanfaatkan "*fatigue*" pemilih terhadap kekuasaan lama dan menawarkan wajah-wajah baru dengan strategi yang lebih agresif.

Dalam konteks demokrasi elektoral, partai politik punya peran krusial untuk melakukan penyampaian visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat lewat berbagai strategi komunikasi politik. Satu diantara pendekatan yang kerap dipakai ialah komunikasi politik secara langsung, ataupun dikenal dengan metode *door to door*.

Komunikasi "*door to door*" ialah pendekatan langsung dari individu ke individu yang dilaksanakan secara tatap muka. Pada konteks politik, strategi ini dipakai guna melakukan penyampaian visi, misi, program kerja, serta mengajak pemilih guna mendukung kandidat tertentu (Jannah et al., 2024). Di tengah maraknya kampanye lewat media sosial dan media massa, strategi komunikasi "*door to door*" dinilai masih relevan, terutama untuk menjangkau pemilih di tingkat akar rumput yang punya keterbatasan akses terhadap informasi digital.

Strategi komunikasi PDI Perjuangan bisa dimaknai sebagai segala keputusan yang diambil PDI Perjuangan untuk mencapai tujuan partai politiknya. Sasaran dari *door to door* di Kota Tangerang ialah masyarakat Kota Tangerang yang memenuhi syarat sebagai pemilih di pemilu 2024.

Metode *door to door* ataupun komunikasi tatap muka secara langsung punya keunggulan dalam membangun kedekatan emosional antara relawan/kader partai dan pemilih. Strategi ini dianggap lebih personal dan mampu membuka ruang dialog yang luas antara partai dan masyarakat. Berdasarkan teori komunikasi interpersonal yang dikemukakan Devito (2013), komunikasi yang bersifat tatap muka memungkinkan terjadinya umpan balik langsung, membangun kepercayaan, serta meningkatkan efektivitas penyampaian pesan sebab bisa disesuaikan dengan karakter penerima pesan.

Beberapa studi memperkuat efektivitas yaitu penelitian dari Green dan Gerber (2004) pada jurnal *Get Out the Vote* menunjukkan bahwa komunikasi *door to door* punya dampak yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama jikalau dilaksanakan orang-orang yang berasal dari komunitas setempat. Di Indonesia sendiri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada hasil survei tahun 2019 menyebutkan bahwa strategi komunikasi langsung seperti *door to door* lebih dipercaya masyarakat dibandingkan kampanye lewat media sosial ataupun iklan politik, sebab dinilai lebih akrab dan relevan dengan kebutuhan warga.

Namun demikian, efektivitas strategi *door to door* juga sangat tergantung pada kualitas komunikasi yang dilaksanakan relawan. Keterampilan berbicara, pemahaman terhadap isu lokal, hingga kemampuan membangun kedekatan dengan warga menjadi faktor penentu keberhasilan komunikasi ini. Di Kota Tangerang, yang ialah bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, strategi ini menghadapi tantangan tersendiri. Tingkat partisipasi pemilih di kota ini di pemilu yang lalu masih fluktuatif. Berdasarkan data

KPU

Kota

Tangerang, partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 hanya mencapai sekitar 78,16%, masih di bawah target nasional 80% (Gintara, 2019).

Kemudian, masyarakat perkotaan cenderung lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi politik. ini menjadi tantangan bagi partai politik, khususnya PDI Perjuangan, dalam menyampaikan pesan politiknya secara tepat. Strategi komunikasi *door to door* bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana membangun relasi dan memperkuat citra partai di mata pemilih (McNair, 2011).

Melihat pentingnya peran komunikasi langsung ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas komunikasi *door to door* yang dilaksanakan PDI Perjuangan di Kota Tangerang di pemilu 2024. penelitian ini tidak sekadar menilai keberhasilan dalam menyampaikan pesan politik, tetapi juga melakukan analisis bagaimana respons masyarakat, hambatan yang dihadapi relawan, serta bagaimana strategi ini mendukung upaya pemenangan calon yang diusung partai.

Dengan demikian, penelitian ini hendaknya dapat memberi kontribusi secara teoritis terhadap penelitian komunikasi politik serta secara praktis bagi partai politik dalam merancang strategi kampanye yang lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan karakteristik pemilih di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang. Satu diantara penelitian yang cukup relevan ialah yang dilaksanakan Hamid, Kadir, dan Uno (2019) dengan judul “Strategi Mobilisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Legislatif di Desa Kota Raja Kabupaten Bombana”. Pada *penelitian* itu dijelaskan bahwa PDI Perjuangan memakai strategi komunikasi interpersonal dengan pendekatan langsung kepada pemilih, termasuk metode *door to door*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ini efektif guna menjangkau pemilih akar rumput, terutama di daerah dengan tingkat literasi media yang rendah. Mereka menemukan bahwa metode tatap muka memungkinkan kader ataupun relawan guna menyampaikan pesan secara lebih personal, serta memberi ruang dialog antara pemilih dan penyampai pesan. Hal ini memperkuat hubungan emosional

ntara partai dan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan elektabilitas caleg dari PDI Perjuangan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, Laila, Syukri, dan Sari (2022) pada penelitiannya dengan judul “Efektivitas Komunikasi Politik Partai NasDem lewat Pendekatan *Door to Door* di pemilu 2019 di Jawa Tengah” juga menunjukkan bahwa strategi *door to door* masih menjadi satu diantara metode kampanye yang paling efektif dalam menyentuh hati pemilih. Walaupun bukan dari PDI Perjuangan, penelitian ini tetap relevan sebab membahas metode yang serupa dan konteks kampanye politik yang serupa. pada penelitian tersebut, ditemukan bahwa pemilih cenderung lebih percaya dan merasa dihargai ketika ada relawan ataupun caleg yang secara langsung hadir ke rumah mereka untuk berdiskusi ataupun sekedar menyapa. Hal ini menunjukkan komunikasi interpersonal, jikalau dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat, mampu menciptakan hubungan politik yang kuat antara partai dan konstituen.

Penelitian lain dari Handayani dan Pratami (2024) tentang strategi kampanye PDI Perjuangan di Banyuasin di pemilu 2024 juga memberi kontribusi penting terhadap topik ini pada penelitian mereka, dijelaskan bahwa PDI Perjuangan memadukan strategi kampanye digital dengan metode konvensional seperti pertemuan tatap muka dan kunjungan langsung ke rumah warga. Hasilnya menunjukkan *door to door* masih menjadi satu diantara strategi utama PDI Perjuangan untuk menjangkau pemilih, terutama di daerah yang akses informasinya terbatas. Para peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan strategi *door to door* sangat ditentukan kemampuan komunikasi kader, pemahaman mereka terhadap kondisi sosial masyarakat setempat, serta adanya dialog dua arah antara kader dan warga.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat *door to door* masih menjadi satu diantara metode komunikasi politik yang cukup efektif, terutama di lingkungan masyarakat yang masih mengedepankan interaksi sosial secara langsung. Namun, efektivitasnya tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor pendukung seperti kualitas relawan, konten pesan politik yang disampaikan,

pemahaman terhadap kondisi lokal, serta respon dari masyarakat itu sendiri. Di Kota Tangerang, sebagai wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang kompleks, efektivitas strategi ini tentu menjadi persoalan penting yang perlu dikaji lebih lanjut secara kontekstual.

## 1.2 Identifikasi Masalah/Fokus Penelitian

Pemilu sebagai pesta demokrasi ialah momentum penting bagi setiap partai politik guna menunjukkan eksistensinya dan memenangkan hati rakyat. pada konteks tersebut, strategi komunikasi politik menjadi kunci utama dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja partai serta pasangan calon yang diusung. Satu diantara strategi yang masih sering dipakai partai politik, termasuk PDI Perjuangan, ialah pendekatan komunikasi secara langsung ataupun *door to door*. Strategi ini dilaksanakan dengan cara mengunjungi rumah-rumah warga secara langsung kader ataupun relawan partai guna membangun kedekatan emosional, menyampaikan informasi secara personal, serta membuka ruang dialog dua arah dengan masyarakat.

PDI Perjuangan sebagai partai politik besar dengan basis massa yang cukup kuat di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Tangerang, kembali memakai strategi *door to door* dalam menghadapi Pemilu 2024. Kota Tangerang ialah daerah yang cukup dinamis dengan keragaman demografis, tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, serta pemilih yang terbagi atas berbagai latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan maraknya kampanye politik lewat media sosial, penggunaan strategi konvensional seperti *door to door* tentu menimbulkan pro dan kontra.

Dari beberapa hasil pemilu yang lalu, terlihat bahwa elektabilitas PDI Perjuangan di Kota Tangerang mengalami fluktuasi. di pemilu 2019, PDI Perjuangan berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan dan menempatkan sejumlah wakilnya di legislatif daerah. Namun, di pemilu 2024, ada indikasi perubahan perilaku pemilih yang mulai lebih selektif dan rasional dalam menentukan pilihan politik. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi PDI

Perjuangan, terutama dalam membangun komunikasi yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Maka dari itu, penting guna mengkaji sejauh mana efektivitas strategi komunikasi *door to door* yang dipakai PDI Perjuangan dalam membentuk opini publik, membangun hubungan interpersonal, dan mendorong loyalitas pemilih.

Di lapangan, implementasi strategi *door to door* tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilannya, seperti kemampuan komunikasi kader, tingkat penerimaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan, konten pesan politik yang dipakai, hingga kesesuaian waktu dan tempat saat melaksanakan kunjungan. Kemudian, respons masyarakat terhadap komunikasi politik langsung ini juga dipengaruhi faktor eksternal seperti preferensi media, kedekatan emosional dengan partai, dan pengalaman masa lalu terhadap kinerja partai ataupun calon yang diusung.

Melihat kompleksitas tersebut, maka fokus permasalahan pada penelitian ini terletak pada bagaimana strategi komunikasi *door to door* PDI Perjuangan dirancang dan dilaksanakan, bagaimana kualitas interaksi yang terjalin antara relawan dengan masyarakat, serta bagaimana pengaruh komunikasi itu terhadap tingkat pemahaman, penerimaan, dan kecenderungan memilih dari masyarakat Kota Tangerang. penelitian ini juga akan mencoba mengungkap kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan komunikasi *door to door*, serta sejauh mana strategi ini mampu bersaing dengan metode kampanye lain yang lebih modern dan digital.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kebutuhan guna mengkaji secara mendalam efektivitas komunikasi politik langsung (interpersonal) yang dilaksanakan PDI Perjuangan pada konteks lokal Kota Tangerang di pemilu 2024. Fokus utama dari penelitian ini ialah untuk melakukan analisis sejauh mana komunikasi *door to door* yang dilaksanakan PDI Perjuangan mampu membangun kepercayaan publik, mempengaruhi persepsi politik warga, dan akhirnya berkontribusi terhadap perolehan suara partai.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus utama penelitian mengenai “Efektif bagi capres, tidak untuk partai: studi efektivitas komunikasi *door to door* PDI Perjuangan di Pemilu 2024”, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai ini:

1. Bagaimana efektivitas komunikasi “*door to door*” yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024 di Kota Tangerang dalam meningkatkan elektabilitas calon presiden dan partai?
  - a. Apa saja faktor yang menyebabkan *door to door* tidak cukup efektif dalam meningkatkan suara untuk PDI Perjuangan?
  - b. Bagaimana respon atau persepsi pemilih terhadap komunikasi relawan PDI Perjuangan dalam kegiatan *door to door*?
  - c. Apakah terdapat perbedaan pendekatan komunikasi dalam mengenalkan calon presiden dan mengenalkan partai kepada pemilih?
  - d. Apa tantangan yang dihadapi relawan saat menyampaikan pesan politik secara *door to door* terkait capres dan partai?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan penelitian pada penelitian ini yakni menjawab rumusan masalah diatas yakni menganalisis efektivitas komunikasi *door to door* yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024, khususnya dalam meningkatkan elektabilitas calon presiden yang diusung.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan pada penelitian ini termasuk pada tujuan yang lebih spesifik yang akan mengantar pada analisis penelitian, yakni:

- 1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil antara dukungan terhadap calon presiden fan partai.

- 2) Memahami bagaimana persepsi dan respon pemilih terhadap pesna politik yang disampaikan relawan saat *door to door*.
- 3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil antara dukungan terhadap capres dan partai.
- 4) Mengeksplorasi tantangan atau kendala pelaksanaan *door to door yang* berkontribusi terhadap kurang optimalnya perolehan suara partai.

## **1.5 Signifikansi Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi politik, terkhusus pada konteks strategi komunikasi yang diterapkan oleh partai politik di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi komunikasi politik, maupun mahasiswa yang tertarik pada bidang komunikasi politik.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan penelitian dan bisa dipakai sebagai bahan untuk memberikan sebuah pandangan berbeda tentang strategi komunikasi politik PDI Perjuangan.
2. Bagi partai politik, khususnya PDI Perjuangan, bisa menjadi bahan masukan strategis bagi partai politik dalam mengevaluasi pendekatan *door to door* agar tidak hanya berdampak dalam elektabilitas capres, tetapi juga suara partai